

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang dibayar ke Indonesia menjadi sumber pemasukan utama untuk salah satunya membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Hasil analisis penerimaan pajak 80% digunakan untuk APBN oleh Mustikasari (2007). Pajak yang dibayar ke Indonesia akan dipakai untuk kemakmuran negara dan masyarakat sesuai dengan Undang Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Masyarakat dan perusahaan menjadi subjek pajak yang secara rutin membayar pajak sesuai ketentuan yang sudah berlaku.

Tabel 1.1 –Realisasi Penerimaan Negara tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara dalam Milyar Rupiah					
	2022	%	2021	%	2020	%
Pendapatan dari Pajak	1.510.001,20	81,79%	1.375.833	79,26%	1.285.136	77,99%
Pendapatan bukan dari pajak	335.555,62	18,18%	357.210	20,58%	343.814	20,87%
Hibah	579,90	0,03%	2.700	0,16%	18.833	1,14%
Total	1.846.136,72		1.735.743		1.647.783	

Sumber : dari Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 menjelaskan pemasukan negara yang paling mendominasi adalah pendapatan dari pajak. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat terjadi penambahan pendapatan dari pajak di setiap tahunnya, yang dapat diartikan aktifnya para fiskus dalam menegakkan aturan perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Pada tahun 2022 pendapatan dari pajak sebesar 81,79% dari total sumber penerimaan negara. Sehingga pemerintahpun terus berupaya untuk

menegakkan aturan pajak supaya subjek pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Setiap perusahaan di Indonesia mempunyai kontribusi ataupun peran besar sebagai subjek pajak badan dalam memenuhi kewajiban yaitu, membayar pajak. Tetapi sering kali, perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*). Korporasi melakukan penghindaran pajak, ketika pajak menjadi beban yang bersifat memberatkan bagi perusahaan. *Tax avoidance* diartikan sebagai upaya untuk menyusutkan pembayaran pajak yang perlu dibayar menggunakan perspektif hukum yang berlaku yang dilakukan perusahaan. Untuk perusahaan, ketika melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan beban sehingga mengurangi *profit* perusahaan yang seharusnya didapatkan. Perusahaan melakukan beberapa tindakan yang termasuk penghindaran pajak karena dianggap legal sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dinilai kurang berkenan di mata pemegang saham, sehingga perusahaan membentuk *corporate governance* untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan dari para *shareholders*. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) diartikan sebagai proses yang disebabkan berdasarkan budaya dan aturan yang ada di dalam suatu perusahaan, termasuk susunan perusahaan dari dewan direksi hingga penasihat keuangan dan hukum untuk dapat menciptakan, dan menambah nilai pemegang saham secara keseluruhan dan berkelanjutan, memenuhi kepentingan dan keinginan para pemangku kepentingan lainnya, selain pemegang saham. Para pemangku kepentingan terdiri atas *supplier*, konsumen, pekerja swasta, distributor,

pemerintah, *shareholders*, dll. Para pemangku kepentingan dapat menilai suatu perusahaan, sehingga yang dapat dilakukan suatu perusahaan adalah dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penelitian ini tata kelola perusahaan dinilai baik diwakilkan dalam komisaris independen dan komite audit.

Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak sebagai subjek pajak dipengaruhi oleh keputusan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Komisaris independen juga menjadi salah satu bagian dari perusahaan yang dapat memberikan pandangan kepada pimpinan perusahaan. Komisaris independen bersifat tidak terikat dengan perusahaan yang memiliki peran menjadi jembatan antara pemilik dan manajemen terkait kebijakan dan kinerja perusahaan termasuk salah satunya penghindaran pajak. Komisaris independen diperlukan suatu perusahaan untuk menjadi pengawas dalam menjaga kualitas perusahaan dalam segi manajemen maupun operasional, sehingga membuat komisaris independen memiliki peranan dalam memberikan saran kepada manajemen, termasuk dalam penghindaran pajak.

Selain komisaris independen, komponen komite audit juga mengambil peran untuk menjaga dan meningkatkan struktur tata kelola perusahaan yang baik dengan tanggung jawab yang dimiliki sehingga dapat memberikan dampak terhadap upaya penghindaran pajak (Pohan, 2013). Komite audit yang memiliki dasar pendidikan akuntansi, akan berguna untuk meningkatkan kualitas keputusan perusahaan termasuk dalam *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menurut Meiranti dan Endang (2021) dalam jurnalnya komisaris independen dan komite

audit dapat memberikan pengaruh positif terhadap penghindaraan pajak. Sementara menurut Indra dan Saeful (2021) komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak, dan menurut Dewi dan Eko (2018) komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tetapi menurut Anggi Syuhada (2019), Jefri dan Yaumil (2019) menghasilkan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Banyak penelitian yang mengambil *tax avoidance* sebagai variabel *dependent* tetapi banyaknya perbedaan hasil yang menjadi faktor faktor pengaruh praktik *tax avoidance*. Unsur unsur tata kelola yang mempunyai pengaruh pada *tax avoidance* seperti salah satunya komisaris independen dan komite audit. Karena itu, dibentuklah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*.”**

1.2 Masalah Penelitian

Masalah penelitian diambil mengikuti topik yang sudah dibuat dalam hal hal yang memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, sehingga masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen mempengaruhi *Tax Avoidance*?
2. Apakah komite audit mempengaruhi *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan masalah penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Mengetahui komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Mengetahui komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya pihak tertentu, seperti :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari penelitian ini dapat menyampaikan informasi bagi perusahaan dalam meninjau kembali jumlah komisaris independen dan jumlah komite audit yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* terutama dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan pada penelitian ini dapat menyampaikan ilmu untuk para mahasiswa lain yang berada dalam jenjang perkuliahan S1 yang dapat dijadikan bahan referensi dengan topik Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian adanya batasan penelitian, untuk meminimalisir kesalahan lingkup topik dan lebih terstruktur dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut seperti :

1. Penelitian mengambil sampel pada kurun waktu dari tahun 2018-2021.
2. Penelitian memfokuskan tata kelola perusahaan yang baik diwakilkan dengan ukuran komite audit dan komisaris independen.
3. Perhitungan untuk melihat pengaruh terhadap *tax avoidance* ini memakai rumus ETR (*effective Tax Rate*) yang nilai tersebut didapat dari laporan

keuangan yang tersedia. Untuk nilai nilai yang terkait pajak, cenderung bersifat konfidensial.

1.6 Sistematika Pembahasan

Diperlukan sistematika pembahasan ini untuk menguraikan secara rinci mengenai yang akan dibahas dalam penelitian ini, secara per bagian (BAB) agar penelitian ini dapat dipahami secara jelas dan teratur yang terdapat 5 BAB, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada BAB 1 menguraikan latar belakang dipilihnya topik dan judul penelitian, yang disertakan dengan masalah utama penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 LANDASAN TEORITIS

Pada BAB 2 menguraikan definisi konsep atau teori dasar, telaah literatur literatur yang memiliki kaitan dengan variabel independent dan dependent, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis terkait topik dan judul yang dipilih oleh peneliti.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada BAB 3 menguraikan populasi, sampel, dan sumber data yang dipakai dalam penelitian. Selanjutnya akan membahas teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasi, dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB 4 memaparkan hasil penelitian mulai dari deskripsi statistik, korelasi antar variabel, hasil uji pendahuluan, hasil uji hipotesis. Lalu diuraikan mengenai pembahasan dengan menghubungkan hipotesis yang diajukan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB 5 memaparkan kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, impikasi hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian ini, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

